

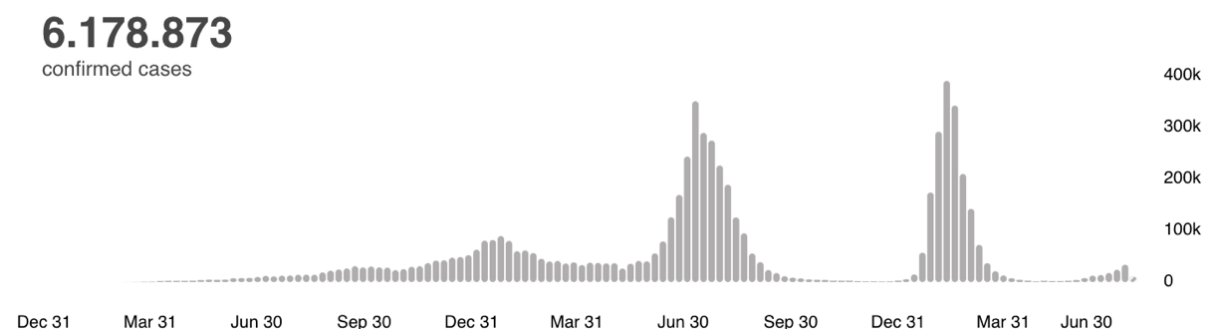
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dari Studi

Pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada minggu terakhir Maret 2020. (Schumacher et al., 2021). Penyakit yang berasal dari China pada Desember 2019 ini telah menyebabkan malapetaka di seluruh dunia, termasuk Indonesia (V. Williams et al., 2021). Pandemi ini telah menyebabkan lebih dari 80.000 kematian dengan 3 juta pemulihan. Penguncian ketat negara selama dua bulan, isolasi segera kasus yang terinfeksi dan pelacakan berbasis aplikasi terhadap orang yang terinfeksi adalah beberapa langkah proaktif yang diambil oleh pihak berwenang. (Boey et al., 2020).

Melihat data dari WHO Secara global, pada 27 Juli 2022, ada 570.005.017 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk 6.384.128 kematian, sedangkan di Indonesia, dari 3 Januari 2020 hingga, 27 Juli 2022, terdapat 6.178.873 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 156.929 kematian, dilaporkan ke WHO seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1. 1 Situasi Indonesia kasus yang dikonfirmasi

Sumber : <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>

Data di atas memperlihatkan adanya kenaikan kasus Covid -19 di Indonesia selama 3 (tiga) kali, pada Januari 2021, Juli 2021 dan Februari 2022. Peningkatan ini terjadi karena adanya mobilitas masyarakat Indonesia pada Januari 2021 kenaikan disebabkan karena Liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2021 hal ini mempunyai kontribusi dalam tingginya tambahan kasus COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu tingginya kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir karena tingkat penularan COVID-19 yang sangat tinggi di masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan *Positivity rate* di mana perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Berdasarkan standar

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka *positivity rate* Covid-19 seharusnya kurang dari 5% dan hal ini disebabkan juga ada masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin.

Pada Juli 2021 gelombang ke dua kenaikan kasus covid-19 diindonesia hal ini disebabkan karena minimnya *tracing* yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Penetapan PPKM Darurat Jawa-Bali menetapkan target testing tiap kabupaten/kota. Untuk *positivity rate* <5% rasio tes minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, 5-<15% rasio tes minimal 5 per 1000 penduduk per minggu, 15-<25% rasio tes minimal 10 per 1000 penduduk per minggu, sedangkan untuk *positivity rate* 25% atau lebih rasio tes minimal 15 per 1000 penduduk per minggu. Menurut Kepala Subbid Dukung Kesehatan Bidang Darurat Satgas Covid-19 Alexander K Ginting menyebut kenaikan kasus COVID-19 saat ini dipicu perubahan varian virus yang dibarengi pelanggaran kepatuhan pada protokol kesehatan.

Gelombang ke tiga kenaikan angka covid-19 diindonesia terjadi pada bulan Februari 2022 hal ini dikarenakan mutasi dari virus covid-19 yang bervariasi Omikron di mana kasus yang dilaporkan adalah 2.980. Terdiri dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) 1.602, lokal 1.093, dan masih diverifikasi 285. 1.100 pasien telah sembuh, sementara lima orang meninggal dunia. Hal ini menyebabkan testing dan *tracing* meningkat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berusaha dan mencari solusi atas permasalahan pandemi covid-19 ini, walaupun ini merupakan kasus baru yang belum pernah terjadi pemerintah Indonesia telah menyiapkan Langkah awal di mana sebagai *Initial Responses* dalam penanganan pandemi covid-19 antara lain :

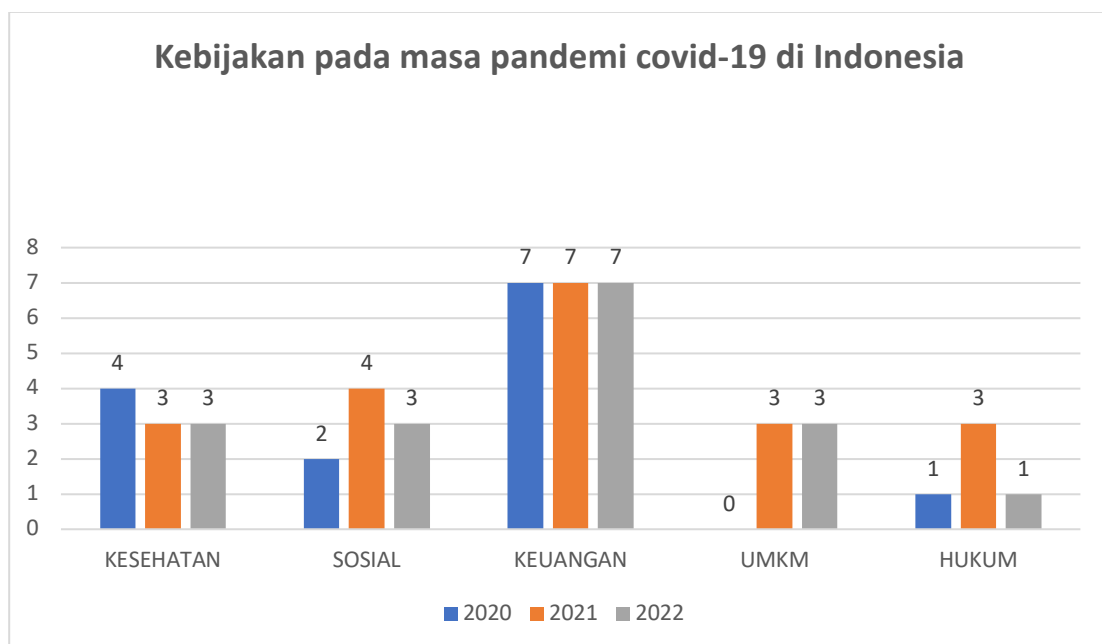
Tabel 1 Initial Responses Pemerintah Indonesia

No.	Tanggal/Bulan	Respon
1.	1 Januari 2020	Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN).
2.	18 Januari 2020	Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu
3.	2 Februari 2020	memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT
4.	31 Maret 2020	Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020; dan Keppres No. 9 Tahun 2020

		tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.
--	--	---

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Dari pengambilan kebijakan yang bersifat makro/ umum dalam penanganan pandemi covid-19 pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan penyebaran virus covid-19 di Indonesia dengan berbagai kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat Indonesia (Ferguson et al., 2022). Kebijakan pemerintah yang diambil dari kurun waktu 2020 hingga 2022 dapat dilihat dari masing – masing bidang diantaranya Kesehatan, sosial, fiskal/keuangan, UMKM, Hukum dan Fasilitas seperti tabel di bawah :



Gambar 1. 2 Kebijakan pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Pada grafik diatas menunjukkan pada tahun 2020 pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan yang diambil pada bidang keuangan dengan jumlah kebijakan 7 kebijakan yang diambil diantara-Nya (1). Relaksasi batas maksimal defisit APBN, (2). PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, (3). Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu dll. Sementara diposisi ke dua adalah kebijakan Kesehatan dengan 4 kebijakan yang diambil diantara-Nya Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD dan Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: tes kit, reagen, ventilator, *hand sanitizer* dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2021, kebijakan keuangan masih menjadi fokus pemerintah dalam pengendalian dampak dari pandemi COVID-19 (Kementerian Keuangan, 2021). Jika pada tahun 2020 kesehatan menjadi kebijakan yang diambil nomor dua, pada tahun 2021 kebijakan sosial menjadi fokus utama. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin (Kementerian Sosial, 2021), Kartu Prakerja yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021), pembebasan biaya listrik (PLN, 2021), dan tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). Di bidang kesehatan, beberapa kebijakan yang diambil antara lain adalah pemberian insentif kepada dokter dan tenaga medis (Kementerian Kesehatan, 2021), santunan kematian bagi tenaga medis yang gugur dalam penanganan COVID-19 (Kementerian Kesehatan, 2021), dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 secara massal (Kementerian Kesehatan, 2021).

Menjelang akhir tahun 2022, pemerintah Indonesia telah melaporkan sejumlah capaian kinerja fiskal dan ekonomi penting selama penanganan pandemi COVID-19. Secara khusus, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 2,38% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menandakan sebuah penurunan signifikan dari target awal yang diperkirakan sebesar 4,51% hingga 4,85%. Defisit ini lebih rendah dibandingkan dengan angka tahun 2021 yang mencapai 4,57% dari PDB. Ini mencerminkan upaya konsolidasi fiskal yang berhasil dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meringankan beban masyarakat selama masa pandemi.

Selain itu, penerimaan negara menunjukkan performa yang luar biasa dengan pertumbuhan yang kuat. Pendapatan negara, yang meliputi penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tumbuh secara tahunan dan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan PNBP mencapai 122,2% dari target yang direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Mengenai inflasi, Indonesia berhasil menjaga tingkatnya di bawah 6% yaitu 5,95%, yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain di tahun 2022, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa. Langkah-langkah pengendalian inflasi di pusat dan daerah telah diambil untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun cukup kuat, dengan PDB nasional tumbuh 5,72% pada triwulan III-2022 dan sudah melampaui level PDB pra-pandemi. Kinerja positif ini menunjukkan ketangguhan perekonomian Indonesia menghadapi tantangan global.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama tiga tahun terakhir, menginginkan Indonesia tidak masuk kepada krisis ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19,

yang pada akhirnya akan berdampak pada banyaknya perusahaan – perusahaan yang tidak beroperasi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jual beli masyarakat yang pada dampaknya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK (Zhu et al., 2020). Akibatnya karyawan tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Terjadinya krisis Kesehatan dan ekonomi akan berdampak kepada terjadinya krisis – krisis yang lain jika tidak di tanggap dengan serius dampak jika berlarut – larutnya akan dapat menjadi krisis sosial, keamanan dan krisis komunikasi (Fatikhova & Ziiatdinova, 2021).

Dalam mengatasi pandemi COVID-19, peran teknologi Big Data dan media sosial semakin vital, terutama dalam fase pencegahan krisis. Big Data, dengan kapasitas analitik yang mengesankan, memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih presisi terhadap penyebaran virus, termasuk melacak mobilitas penduduk, mengidentifikasi daerah yang berpotensi menjadi kluster baru, dan memprediksi arah tren penyebaran. Pemerintah Indonesia, mengakui potensi signifikan dari teknologi ini, telah menggunakannya untuk meningkatkan upaya pencegahan (Kim, 2021).

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, muncul tantangan terkait dengan ketidakpastian dan tingkat ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Meski pembatasan pergerakan, kampanye edukasi, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat telah diterapkan, tetap ada tingkat ketidakpatuhan yang mempersulit upaya pemutusan rantai penyebaran virus. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko penyebaran (Yen, 2020). Selain itu, keterbatasan infrastruktur kesehatan, termasuk jumlah tempat tidur di rumah sakit dan ketersediaan alat medis, menjadi kendala serius dalam menangani lonjakan kasus secara efektif (Park, 2021). Investasi yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan fasilitas kesehatan diperlukan untuk mengatasi situasi darurat dan memperkuat daya tahan sistem kesehatan.

Setelah fase pencegahan krisis, langkah berikutnya adalah tanggapan darurat, yang memerlukan koordinasi yang efisien dan tindakan cepat. Big Data memainkan peran penting dalam fase ini, termasuk dalam pemantauan dan pengelolaan pasien, inventarisasi persediaan obat dan alat medis, serta pelacakan kontak. Penggunaan Big Data dalam mengidentifikasi pola-pola geografis yang berpotensi menjadi zona risiko tinggi memungkinkan pemerintah membuat keputusan yang lebih informatif dan tepat waktu. Studi tentang penggunaan Big Data selama pandemi COVID-19 di Hainan, China, menunjukkan pentingnya teknologi ini dalam meningkatkan manajemen kedaruratan epidemik, yang meliputi berbagai tahapan dari mitigasi, kesiapan, respons, hingga pemulihan (Alsunaidi et al., 2021).

Selain itu, teknologi digital seperti sistem surveilans otomatis, penggunaan data dari media sosial, dan aplikasi pelacakan kontak digital telah membantu dalam respons cepat terhadap pandemi. Ini termasuk pengidentifikasian kasus secara dini, isolasi pasien, dan pelacakan serta karantina kontak erat. Contoh aplikasi Big Data mencakup dashboard data yang mengumpulkan data kesehatan publik secara real-time untuk mendukung pembuat kebijakan (Mao et al., 2021). Namun, dengan setiap penggunaan teknologi canggih, muncul tantangan dalam integrasi dan interpretasi data. Penting bagi pemerintah untuk memiliki sistem analisis data yang mampu mengolah dan menyajikan informasi secara mudah dimengerti dan bermanfaat bagi pengambil keputusan. Privasi dan keamanan data adalah isu penting lainnya yang harus ditangani dengan serius untuk mencegah penyalahgunaan atau eksposur data pribadi masyarakat secara tidak sah (Budd et al., 2020).

Pada tahap kesiapsiagaan krisis, pelatihan simulasi yang diperkaya dengan Big Data dapat menyediakan skenario yang realistis berdasarkan data sebenarnya, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam simulasi untuk mengoptimalkan respons terhadap krisis. Big Data, dengan kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis set data yang sangat besar dari berbagai sumber, termasuk data yang tidak terstruktur seperti dokumen, email, posting blog, dan data multimedia, dapat membantu dalam mendapatkan wawasan baru yang sebelumnya tidak dapat diakses. Ini termasuk penggunaan database NoSQL untuk menyimpan dan mengakses data yang tidak terstruktur, yang memungkinkan skala, kecepatan, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan database relasional tradisional (Qadir et al., 2016). Simulasi krisis menawarkan kesempatan unik bagi anggota tim manajemen krisis untuk berlatih peran dan respons mereka, memperoleh persetujuan manajemen senior untuk perencanaan manajemen krisis, dan memvalidasi pengaturan kelangsungan bisnis dari ujung ke ujung. Latihan simulasi dapat membantu mengekspos celah dalam rencana, masalah yang perlu ditangani, dan area perencanaan kelangsungan bisnis yang mungkin perlu ditingkatkan. Latihan meja (tabletop exercises) merupakan investasi pelatihan simulasi yang ekonomis, membantu pemain kunci meningkatkan kesiapan pribadi mereka (Budd et al., 2020).

Big Data memiliki peran penting dalam pengumpulan dan analisis data, sedangkan media berperan vital dalam penyebaran informasi kepada masyarakat (Alsunaidi et al., 2021). Media massa, media sosial, dan platform komunikasi daring merupakan saluran efisien yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi terbaru, mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan, serta menanggulangi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks (Budd et al., 2020).

Dalam tahap tanggapan darurat, pemanfaatan media massa mencakup penyampaian informasi terkait kebijakan, perkembangan terkini, serta instruksi kesehatan kepada masyarakat. Program-program edukasi melalui media memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai virus serta langkah-langkah perlindungan diri yang diperlukan (Mao et al., 2021). Media efektif dalam memotivasi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pencegahan dan dalam membangun kepercayaan. Namun, tantangan terletak pada kepastian bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang beragam (Krejsler, 2021). Koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan media adalah esensial untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan dapat dipercaya. Di sisi lain, literasi media yang meningkat di kalangan masyarakat penting untuk membedakan informasi yang sah dari yang tidak (Popkova & Sergi, 2022).

Dalam manajemen pasca-krisis, Big Data memainkan peran penting dalam menganalisis dampak jangka panjang terhadap ekonomi, kesehatan mental, dan disparitas sosial (Kim, 2021). Analisis data besar menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat yang terdampak. Media tetap berperan sebagai platform penting untuk menyampaikan informasi tentang langkah-langkah pemulihan, sumber daya yang tersedia, dan memberikan panduan kepada masyarakat mengenai adaptasi terhadap normal baru. Namun, tantangan dalam pengukuran dampak pasca-krisis meliputi kompleksitas situasi dan berbagai variabel yang harus diperhitungkan. Evaluasi yang mendalam dan metrik yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Strategi pemulihan ekonomi yang efektif dan matang diperlukan untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, isu ketidaksetaraan dalam akses kesehatan memerlukan perhatian khusus dalam manajemen pasca-krisis (Zheng et al., 2022). Penguatan sistem kesehatan, khususnya di daerah yang kurang terjangkau, sangat penting untuk mengurangi disparitas dalam pelayanan kesehatan (Seshadri & Kumar, 2023).

Dalam manajemen insiden krisis, Big Data dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi dan kebutuhan mendesak (Smith & Johnson, 2021). Penggunaan data secara real-time memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap perubahan skala dan keparahan krisis. Media tetap menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi kritis, mengkoordinasikan bantuan, dan memobilisasi dukungan masyarakat (Lee, 2020). Namun, tantangan dalam manajemen insiden krisis termasuk koordinasi antarlembaga yang belum

optimal dan ketangguhan sistem yang memerlukan investasi signifikan untuk memastikan kelancaran proses tanggap darurat (Kumar & Shah, 2019). Kepercayaan masyarakat menjadi kritis dalam situasi krisis; pengakuan krisis harus dilakukan secara transparan untuk menjaga kredibilitas pemerintah.

Meskipun pemanfaatan Big Data dan media memiliki potensi besar untuk memperkuat manajemen krisis, tantangan signifikan tetap ada. Privasi dan keamanan data merupakan isu utama yang harus ditangani dengan cermat (Goldberg et al., 2022). Perlu adanya kebijakan dan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan dan pelanggaran keamanan. Selain itu, literasi digital di kalangan masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemanfaatan teknologi ini (Chen, 2021). Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk dapat mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi yang disajikan melalui media digital. Kurangnya literasi digital dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu dan meningkatkan tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sumber informasi resmi. Pengelolaan risiko informasi palsu atau hoaks juga menjadi bagian integral dari manajemen krisis. Media menjadi sarana yang mudah untuk menyebarkan informasi palsu, yang dapat menciptakan kebingungan di masyarakat dan merusak upaya pencegahan dan tanggapan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada upaya terus-menerus dalam mendeteksi dan menanggulangi informasi palsu serta meningkatkan literasi media di masyarakat (Wang & Zhang, 2023).

Dari pemahaman mendalam terhadap latar belakang tersebut, penelitian ini akan dilakukan untuk menggali dan mencari wawasan yang lebih mendalam mengenai manajemen krisis COVID-19 yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2022. Adanya kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari pencegahan krisis, tanggapan darurat, kesiapsiagaan krisis, manajemen pasca krisis, hingga manajemen insiden krisis, menjadi dasar penelitian untuk menjelajahi dinamika tindakan pemerintah dalam menghadapi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Penelitian ini akan berfokus kepada ruang lingkup manajemen krisis, yang meliputi manajemen sebelum, selama, dan setelah krisis. Aspek pra-krisis akan menelaah strategi pencegahan dan kesiapsiagaan yang diterapkan oleh pemerintah, sedangkan manajemen insiden krisis akan mengkaji bagaimana pemerintah mengelola dan mengkoordinasikan responsnya terhadap perubahan situasi dan kebutuhan mendesak. Selain itu, manajemen pasca-krisis akan dianalisis untuk memahami tindakan pemulihan dan evaluasi yang dilakukan setelah krisis. Penggunaan Big Data dan media sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan komunikasi akan menjadi bagian integral dari penelitian ini dalam semua fase manajemen krisis. Dengan merinci

aspek-aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola krisis COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan laporan retrospektif, tetapi juga bertujuan menjadi panduan yang berharga untuk pembelajaran dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif di masa depan, baik dalam menghadapi pandemi maupun krisis kesehatan serupa yang dapat terjadi di masa mendatang.

1.2. Masalah Penelitian

Pertanyaan inti dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

- a. Bagaimana manajemen krisis pemerintah Indonesia di masa COVID-19 pada fase manajemen sebelum krisis?
- b. Bagaimana manajemen krisis pemerintah Indonesia di masa COVID-19 pada fase manajemen setelah krisis?
- c. Bagaimana Komparasi manajemen krisis pemerintah Indonesia di masa COVID-19 pada fase manajemen sebelum dan setelah krisis?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai manajemen krisis pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 mencakup beberapa aspek kritis, terutama dalam konteks manajemen sebelum, selama, dan setelah krisis. Aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi manajemen sebelum krisis, manajemen setelah krisis, dan manajemen insiden krisis. Manajemen sebelum krisis mencakup langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi darurat. Pencegahan krisis melibatkan respons terhadap masalah dan manajemen risiko, termasuk pemindaian awal untuk mendeteksi potensi ancaman. Tanggapan darurat merupakan bagian penting dari manajemen sebelum krisis, di mana kecepatan dan efisiensi respon menjadi kunci dalam mengatasi situasi krisis.

Kesiapsiagaan krisis melibatkan aspek pelatihan simulasi untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menangani situasi darurat. Sistem manual dan proses perencanaan juga menjadi fokus dalam memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai skenario krisis yang mungkin terjadi. Manajemen setelah krisis memainkan peran krusial dalam pemulihan dan evaluasi dampak pasca krisis. Metrikasi dan evaluasi akan membantu mengukur efektivitas langkah-langkah yang diambil selama krisis. Proses pemulihan menjadi langkah selanjutnya untuk memastikan pemulihan yang cepat dan efisien dari dampak krisis tersebut.

Manajemen insiden krisis mencakup langkah-langkah selama terjadinya krisis, termasuk manajemen krisis yang efektif, respons aktivitas sistem yang cepat, dan pengakuan krisis secara tepat waktu. Pendekatan yang terfokus dan respons sistem yang cekatan dapat meminimalkan dampak negatif dan membentuk landasan untuk pemulihan pasca-krisis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana pemerintah Indonesia mengelola krisis kesehatan selama pandemi COVID-19, mengevaluasi kemampuannya dalam menghadapi situasi darurat.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi manajemen krisis yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi COVID-19. Fokus utama penelitian ini adalah identifikasi kebijakan pencegahan krisis, termasuk analisis terhadap respons darurat dan manajemen risiko yang dijalankan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan metode pemindaian awal dalam mendeteksi dan merespons potensi ancaman kesehatan. Aspek kesiapsiagaan juga menjadi fokus penting, dengan evaluasi terhadap simulasi pelatihan, sistem manual, dan proses perencanaan yang diimplementasikan untuk menghadapi skenario krisis.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metrik dan evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai dampak pasca-krisis dan mengukur efektivitas langkah-langkah pemulihan. Penelitian juga akan mengkaji efektivitas manajemen krisis selama krisis berlangsung, termasuk respons aktivitas sistem dan pengakuan terhadap krisis yang terjadi. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kesiapsiagaan serta respons di masa yang akan datang.

1.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada informasi yang tersedia sampai dengan tanggal pengetahuan terakhir saya pada Desember 2022. Kondisi dan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 bisa saja mengalami perubahan setelah itu, yang mungkin tidak tercakup dalam analisis ini. Kedua, batasan sumber daya dan waktu dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap aspek-aspek tertentu dari manajemen krisis. Penelitian ini berfokus pada

pandemi COVID-19 di Indonesia dan mungkin tidak mencakup secara menyeluruh dinamika yang berkaitan dengan krisis kesehatan global.

Ketiga, penelitian ini terbatas pada perspektif pemerintah, dan pandangan dari pihak-pihak lain seperti masyarakat sipil, sektor swasta, atau organisasi non-pemerintah mungkin tidak sepenuhnya terefleksi. Evaluasi pihak eksternal dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap manajemen krisis. Keempat, karena sifat retrospektif penelitian ini, interpretasi dan evaluasi keberhasilan atau kegagalan langkah-langkah manajemen krisis dapat dipengaruhi oleh sudut pandang subjektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan dengan hati-hati terhadap potensi bias. Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan ini, hasil penelitian ini sebaiknya diinterpretasikan dengan berhati-hati dan dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut yang mungkin dapat mengatasi batasan-batasan tersebut.